PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada OPD di Kota dan Kabupaten Magelang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1

Disusun Oleh:
Widya Mutiara Ningrum
NIM 15.0102.0074

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada OPD Kota dan Kabupaten Magelang)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun Oleh:
Widya Mutiara Ningrum
NIM.15.0102.0074

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019

SKRIPSI

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris pada OPD di Kota dan Kabupaten Magelang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Widya Mutiara Ningrum

NPM **15.0102.0074**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal **27 Juli 2019**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Nur LailaYuliani, S.E., M.Sc., Ak

Pembimbing I

Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si

Pembimbing II

Tim Penguji

Siti Noor Khikmah, SE, M.Si. Ak.

Ketua

Nur LailaYuliani, S.E., M.Sc., Ak

Sekretaris

Faqiatul Mariya Waharini, SE. M.Si

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal, 26 AUG 2019

Dra. Marlina Kurnia, MM

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Scanned with CamScanner

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Widya Mutiara Ningrum
NIM	: 15.0102.0074
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Progam Studi	: Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada OPD Kota dan Kabupaten Magelang)

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 16 Agustus 2019
Pembuat Pernyataan,



Widya Mutiara Ningrum
NIM. 15.0102.0074

Scanned with CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Widya Mutiara Ningrum
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	:	Magelang, 16 Agustus 1997
Agama	:	Islam
Status	:	Belum Menikah
Alamat Rumah	:	Jl. Rambutan 7 No.03 RT07/RW06 Kalinegoro Mertoyudan Magelang
Alamat Email	:	widyamutiara50@gmail.com

Pendidikan Formal

Sekolah Dasar	(2003-2009)	: SD Negeri Kalinegoro 5
SMP	(2009-2013)	: SMP Negeri 1 Kota Mungkid
SMA	(2013-2015)	: SMA N 1 Mertoyudan
PT	(2015-2019)	: S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, 16 Agustus 2019
Pembuat Pernyataan,



Widya Mutiara Ningrum
NIM. 15.0102.0074

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.
(QS. Asy Syarh : 6-9)

Ketika semua hal tidak sejalan dengan keinginan, ingatlah bahwa sebuah pesawat terbang beroperasi dengan melawan arah angin, bukan dengan mengikutinya
(Henry Ford)

Cukuplah Allah sebagai Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung
(QS. Ali Imran :173)

"*Man Jadda Wa Jadda*"
Barang siapa yang bersungguh – sungguh akan mendapatkannya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Atas karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Opd Kota Dan Kabupaten Magelang)"**.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang. Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak. selaku Ketua prodi Studi Akuntansi dan dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Siti Noor Khikmah, SE., M.Si., Ak. selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah membantu memberikan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
3. Ibu Faqiatul Mariya Waharini, SE., M.Si. selaku dosen penguji 2 (dua) yang sudah membantu memberikan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Ayah, Ibu, dan Kakak terimakasih atas do'a dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
6. Teman-teman akuntansi angkatan 2015 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis hanya dapat mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umunya.

Magelang, 16 Agustus 2019
Peneliti



Widya Mutiara Ningrum
NPM. 15.0102.0074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN xi
ABSTRAK xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kontribusi Penelitian 9
E. Sistematika Pembahasan 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 12
A. Telaah Literatur 12
1. Teori Keagenan (*Agency Theory*) 12
2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 14
3. Standar Akuntansi Pemerintahan 17
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi 19
5. Sistem Pengendalian Intern 21
6. Kompetensi Sumber Daya Manusia 24
B. Telaah Penelitian Sebelumnya 26
C. Perumusan Hipotesis 29
D. Model Penelitian 35
BAB III METODA PENELITIAN 36
A. Populasi dan Sampel 36
B. Teknik Pengambilan Sampel 37
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 38
D. Alat Analisis Data 40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 46
A. Statistik Deskriptif Data 46
B. Statistik Deskriptif Responden 46
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 47
D. Uji Kualitas Data 50
E. Analisis Regresi Linear Berganda 53
F. Pengujian Hipotesis 53
G. Pembahasan 58
BAB V KESIMPULAN 65
A. Kesimpulan 65

B. Keterbatasan Penelitian 66
C. Saran 66
DAFTAR PUSTAKA 67
LAMPIRAN 70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan Opini LKPD se Wilayah Kedu Tahun 2015-2017 3
Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya 26
Tabel 3. 1 Definisi dan Pengukuran Variabel 38
Tabel 4. 1 Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian Kuesioner 46
Tabel 4. 2 Profil Responden 47
Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 48
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas 50
Tabel 4. 5 Cross Loading 50
Tabel 4. 6 Pengujian Reliabilitas 52
Tabel 4. 7 Koefisien Regresi 53
Tabel 4. 8 Uji F 53
Tabel 4. 9 Uji F 54
Tabel 4. 10 Uji t 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Penelitian 35
Gambar 3. 1 Penerimaan Uji F..... 44
Gambar 3. 2 Penerimaan Uji t..... 45
Gambar 4. 1 Penerimaan Uji F..... 55
Gambar 4. 2 Penerimaan Hipotesis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah ... 56
Gambar 4. 3 Penerimaan Hipotesis Pemanfaatan Teknologi Informasi 57
Gambar 4. 4 Penerimaan Hipotesis Sistem Pengendalian Intern..... 57
Gambar 4. 5 Penerimaan Hipotesis Kompetensi Sumber Daya Manusia..... 58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 71
Lampiran 2. Daftar Sampel dan Pengembalian Kuesioner 77
Lampiran 3. Tabulasi Data Kuesioner (Data Mentah) 79
Lampiran 4. Tabulasi Data Kuesioner (Setelah Validasi) 87
Lampiran 5. Data Valid dan Tidak Valid 95
Lampiran 6. Statistik Deskriptif 96
Lampiran 7. Uji Validitas 97
Lampiran 8. Uji Reliabilitas 102
Lampiran 9. Hasil Analisis Regresi 104

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada OPD Kota dan Kabupaten Magelang)

Oleh:
Widya Mutiara Ningrum

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan sampel pegawai bagian keuangan di OPD Kota dan Kabupaten Magelang. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 116, berdasarkan metode *purposive sampling*, yaitu pegawai yang terdiri dari kepala sub bagian keuangan, bendahara, sekretariat, pejabat penatausahaan keuangan, staf keuangan dan memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun, serta Pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat. Pemilihan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif. Sedangkan, Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata kunci : ***Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena yang sedang terjadi di Indonesia saat ini adalah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi apakah telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan melalui suatu media pertanggungjawaban dan dilaksanakan secara periodik.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu bentuk upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Menurut Suwardjono (2005), informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan pemerintah harus bermanfaat bagi para pemakai, yaitu harus memiliki nilai atau kualitas yang dapat mendukung pengambilan keputusan dan laporan tersebut dapat dipahami oleh para pemakai, termasuk didalamnya adalah masyarakat. Adapun komponen laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah harus memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yang diantaranya yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjwaban, dan pengawasan keuangan daerah. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas suatu laporan keuangan, yaitu diantaranya penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapatkan penilaian berupa opini dari BPK. BPK memberikan 4 macam opini yang terdiri dari: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP); Opini Tidak Wajar (TW); dan Tidak memberi opini (*disclaimer*). Opini tersebut mencerminkan kualitas suatu laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, berjalannya fungsi pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Halim, 2007). Laporan keuangan yang berkualitas akan mendapatkan opini WTP dari BPK.

Tabel 1. 1
Perkembangan Opini LKPD se Wilayah Kedu Tahun 2015-2017

Entitas Pemerintah Daerah	OPINI				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kab Kebumen	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP
Kota Magelang	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
Kab Magelang	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
Kab Purworejo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab Temanggung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab Wonosobo	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber: IHPS BPK RI Semester I Tahun 2017

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kota dan Kabupaten Magelang dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 dan 2017 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Opini tersebut menandakan bahwa Kota dan Kabupaten Magelang telah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mereka buat. Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut merupakan sebuah apresiasi terhadap instansi pemerintah yang telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik.

Selain itu, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemerikasaan Keuangan (BPK) atas 537 LKPD juga mengungkapkan bahwa adanya kelemahan SPI yang terdiri atas 2.156 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.657 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 1.240 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern (BPK, IHPS Semester I 2017).

BPK Perwakilan Jawa Tengah mengungkapkan bahwa SDM pemerintah daerah maupun pemerintah kota masih belum memadai untuk mendukung implementasi laporan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berdasarkan hasil sampel pemeriksaan laporan SAP tahun 2015 di Jateng diketahui SDM yang ada belum memenuhi syarat kompetensi (ww.bpk.go.id). Walaupun telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, permasalahan aset di Kota dan Kabupaten Magelang masih belum bisa dituntaskan. Sejak awal tahun 2017,

perbaikan laporan keuangan terutama masalah aset terus diprioritaskan, sedangkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga masih dituntut untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan dan aset (Magelang Kota, 2018).

Penerapan SAP Nomor 71 dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pemakainya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang dibuat oleh para instansi harus disusun berdasarkan SAP yang telah ditetapkan, agar laporan tersebut dapat berkualitas.

Menurut penelitian Purba (2017) tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang, menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahardini dan Miranti (2018) dan Rahmawati, dkk (2018) bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun dalam penelitian Yuliani dan Agustini (2016) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfataan teknologi informasi yang dalam hal ini adalah aplikasi komputer akuntansi pada lingkup pemerintah daerah sangat penting dalam

membantu untuk menyusun laporan keuangan dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Pemanfaatan teknologi informasi ini dapat meminimalisir kesalahan penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat berkualitas. Berdasarkan penelitian Rahmawati, dkk (2018) tentang pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan, menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut juga diperkuat oleh penelitian Nurillah dan Muid (2014) dan Yuliani dan Agustini (2016) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Riandani (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Upaya untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Fungsi pengendalian ini dilakukan oleh Kepala Daerah melalui sistem pengendalian intern. Menurut Jogiyanto (2007), dengan adanya pengendalian intern, diharapkan akan semakin tinggi kualitas informasi yang dihasilkan yang selanjutnya akan mempengaruhi secara positif produktivitas organisasional.

Penelitian Kiranayanti dan Erawati (2016) tentang sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah, menyatakan

bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Karsana dan Suaryana (2017) dan Triyani (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang harus dimiliki oleh instansi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam membuat laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Pujanira & Taman (2017) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DIY menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian Triyanti (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2018) dengan persamaan menggunakan seluruh variabel, sedangkan perbedaannya yaitu **pertama,** menambahkan variabel kompetensi sumber daya manusia, karena kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor yang harus dimiliki oleh instansi. Dalam teori *stewardship*, kompetensi sumber daya manusia merupakan upaya *stewards* dalam melaksanakan tanggungjawabnya dan dalam mencapai tujuan organisasi. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten maka akan mempermudah dalam menyusun laporan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas. Semakin kompeten sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu instansi maka akan semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Karsana dan Suaryana, 2017). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahardini & Miranti (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Kedua, objek penelitian yaitu OPD Kota dan Kabupaten Magelang, karena OPD Kota dan Kabupaten Magelang masih mempunyai permasalahan aset yang belum dapat dituntaskan. Hal tersebut karena sumber daya manusia yang belum memenuhi syarat kompetensi, yaitu pada bagian keuangan yang seharusnya sudah berpengalaman di bidang akuntansi atau keuangan, tetapi pada prakteknya bukan yang berpengalaman dalam bidang tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

D. Kontribusi Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, terutama yang berkaitan tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi masukan atau pertimbangan dalam mengambil keputusan ataupun kebijakan, dan dapat memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi sektor publik di Indonesia untuk masa yang akan datang.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan

program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Literatur

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan memiliki prinsip utama berupa hubungan kerja antara dua pihak yaitu pihak yang memberikan wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agency*) dalam suatu bentuk kerja sama yang dinamakan dengan "*nexus of contract*". Agen berperan sebagai pihak yang diberikan kontrak oleh *principal* untuk bekerja sesuai dengan kepentingan *principal*. Teori keagenan dapat diartikan dimana adanya suatu hubungan diantara dua pihak yaitu *principal* dan agen yang diperintah untuk suatu pekerjaan atau jasa dalam suatu kontrak yang mengatasnamakan *principal* dan memberikan kebebasan penuh untuk agen dalam menentukan kebijakan yang bermanfaat bagi *principal* (Jensen & Meckling, 1976).

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen, sehingga agen tidak selamanya mengikuti keinginan *principal*. Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa dan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Hubungan tersebut dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetry information*). Untuk mengurangi masalah tersebut menimbulkan biaya

yang akan ditanggung oleh *principal* atau agen yaitu *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*.

Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku agen. *Bonding cost* adalah biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme agar bertindak untuk kepentingan *principal*. *Residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan *principal*.

Keterkaitan adanya *agency theory* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pelaporan keuangan, yang dimana pemerintah disini bertindak sebagai pihak yang diberi amanah (*agent*) maka berkewajiban untuk mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi yang dimana bertindak sebagai *principal* untuk menilai akuntabilitas dan memutuskan kebijakan sosial, politik, maupun ekonomi baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hal ini, OPD yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan yaitu masyarakat secara langsung maupun diwakilkan oleh DPRD sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik secara langsung atau tidak langsung.

2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Halim (2007), laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, menjelaskan karakteristik-karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan-laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, karakteristik sebagai berikut:

a. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah informasi yang:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

   Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3. Tepat waktu

   Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4. Lengkap

   Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

   Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Penyajian Jujur

   Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

   Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak beda jauh.

3. Netralitas

   Informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat Dibandingkan

   Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingkan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingkan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang

lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik, apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

3. Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan , "Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah". Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang

dilakukan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan dalam pemerintah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa: "Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, hutang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan keuangan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD". SAP dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disebut PSAP. PSAP terdiri dari PSAP Nomor1 sampai dengan Nomor 11.

PSAP No. 1 tentang penyajian laporan keuangan, No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA), No. 3 tentang Laporan Arus Kas, No. 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), No. 5 tentang akuntansi persediaan, No. 6 tentang akuntansi investasi, No. 7 tentang akuntansi aset tetap, No. 8 tentang akuntansi kontruksi dalam pengerjaan, No. 9 tentang akuntansi kewajiban, No. 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa, dan No. 11 tentang laporan keuangan konsolidasi (Pasal 4 PP 71 Tahun 2010).

SAP merupakan dasar pencatatan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan yang tidak dibuat atau disusun berdasarkan SAP hasil

dari laporan keuangan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya SAP, maka pencatatan laporan keuangan akan menjadi transparan dan akurat, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) diyakini dapat memberikan dampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Menurut PP No. 71 seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengimplementasikan SAP dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada berbagai pihak dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Wilkinson (2000), pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer, perangkat lunak, *database*, jaringan, *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi sangat membantu manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk menjalankan sistem informasi komputer yang terintegrasi yang didesain untuk menyediakan data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sumber daya manusia. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer

yang lain sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar dapat disebar dan diakses secara global.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis saja, tetapi dimanfaatkan juga pada organisasi sektor publik, yang termasuk didalamnya adalah organisasi pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memnungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik, dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar dapat memudahkan akses pelayanan publik dan juga murah.

5. Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendefinisikan pengendalian intern adalah: "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan".

Pengendalian intern pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI terdiri dari lima unsur antara lain; lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian, pemantauan, serta informasi dan komunikasi. Unsur-unsur dalam SPI tersebut menyajikan suatu pengendalian yang saling terkait dan dapat meyakinkan pengguna bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material. Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi atau dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi (Bastian, 2011).

Hal-hal yang harus diterapkan dalam pengendalian intern agar dapat efektif dan berjalan dengan baik, adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi:

1. Pengendalian umum

   Pengendalian ini meliputi pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan.
2. Pengendalian aplikasi

   Pengendalian ini meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

SAS mendefinisikan lima komponen pengendalian intern yang saling berkaitan pada pernyataan COSO yaitu:

1. Lingkungan pengendalian (*Control environment*)

   Lingkungan pengendalian menunjukkan atmosfir atau suasana (*sets the tone*) dalam suatu organisasi atau perusahaan yang mempengaruhi kesadaran pengendalian (*control consciousness*) dari orang-orang dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian ini merupakan fondasi bagi komponen lainnya dan sangat dipengaruhi oleh suasana yang diciptakan dari atas atau *tone at the top*.

2. Penilaian risiko (*Risk assessment*)

   Penilaian risiko merupakan suatu mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai risiko dalam organisasi yang dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

3. Aktivitas pengendalian (*Control activities*)

   Aktivitas pengendalian mencakup kebijakan dan prosedur untuk membantu meyakinkan bahwa semua tindakan dilaksanakan sesuai dengan arahan manajemen yang dilakukan secara efektif.

4. Informasi dan komunikasi (*Information and communication*)

   Sistem informasi dan komunikasi memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk memperoleh dan berbagi informasi yang diperlukan untuk mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasional yang terdapat di dalam organisasi tersebut.

5. Pengawasan (*Monitoring*)

   Pengawasan merupakan proses penilaian terhadap kualitas dan efektivitas dari sistem pengendalian intern, termasuk modifikasi dan penyempurnaannya apabila diperlukan. Terdapat hubungan langsung antara ketiga kategori tujuan yang harus dicapai dengan kelima komponen pengendalian intern.

Jadi, pengendalian intern dapat dikatakan sebagai suatu proses yang telah dirancang sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintahan. Selain itu, pengendalian intern bermaksud untuk memberikan keyakinan atas pencapaiannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

6. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Darwanis (2009), manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Karena, manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi, yang membuat tujuan-tujuan, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi, serta manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang membuat sumber daya lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan organisasi. Menurut Abdul (2010) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena

itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Upaya untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi harus memiliki daya kompetensi yang tinggi. Kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevei, 2005). Kualitas dari laporan keuangan yang disusun, dikelola dan dilaporkan sangat bergantung kepada tiga hal ini. Kompetensi adalah salah satu karakteristik yang mendasari seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan.

Selain daya kompetensi yang tinggi, sumber daya manusia juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan karena hal tersebut merupakan salah satu faktor yang penting untuk menilai kualitas sumber daya manusia yang efektif bagi suatu organisasi. Pengetahuan dan kemampuan merupakan sumber daya paling unik dan dapat diperbaharui yang dapat dimanfaatkan oleh suatu organisasi. Pegawai yang tidak

mempunyai pengetahuan yang memadai akan susah dalam mengerjakan pekerjaannya dan juga akan menyebabkan pemborosan bahan, waktu maupun tenaga dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Kegagalan sumber daya manusia dalam pemerintah daerah termasuk OPD dalam memahami dan menerapkan ilmu akuntansi terutama akuntansi pemerintahan akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan pemerintah.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2. 1
Penelitian Sebelumnya

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil
1.	Nurillah dan Muid (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern, masing-masing berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2.	Kiranayanti dan Erawati (2016)	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemahaman basis akrual, masing-masing berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3.	Yuliani dan Agustini	Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan	Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil
	(2016)	Pemerintah Daerah	teknologi informasi berpengaruh positif. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4.	Karsana dan Suaryana (2017)	Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan SPI pada Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Bangli	Penerapan SAP, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
5.	Purba (2017)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Kebijakan Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang	Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh secara simulan dan parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara parsial.
6.	Pujanira dan Taman (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil
		Daerah Provinsi DIY.	pemerintah daerah.
7.	Riandani (2017)	Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Kompetensi SDM dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
8.	Triyanti (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
9.	Mahardini dan Miranti (2018)	Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	Penerapan standar akuntansi pemerintah daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.
10.	Rahmawati, dkk (2018)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan	Penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
11.	Triyani (2018)	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas	Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil
		Laporan Keuangan Daerah	terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Sumber: beberapa penelitian terdahulu diolah, 2019

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan laporan keuangan Pemerintah (LKPD) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, sehingga SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Rahmawati, dkk 2018).

Hubungan agensi muncul ketika *principal* memberikan wewenang kepada agen, sehingga agen wajib mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan kepada *principal*. Hubungan agensi dapat menimbulkan masalah ketidakseimbangan informasi (*asymmetry information*) karena agen memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan dan posisi operasi entitas yang sebenarnya dibanding *principal*.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mengurangi asimetri informasi dengan cara *bonding cost*.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dapat mengurangi kesalahan maupun kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa dalam menyusun laporan keuangan harus sesuai dengan SAP. Dengan demikian dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah yang baik maka dapat meminimalisir terjadinya asimetri informasi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi berkualitas.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Purba (2017), Rahmawati, dkk (2018), serta Mahardini dan Miranti (2018) dalam penelitiannya membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H1. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Menurut Wilkinson (2000), pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer, perangkat lunak, *database*, jaringan, *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi sangat membantu manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk menjalankan sistem informasi komputer yang terintegrasi yang didesain untuk menyediakan data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sumber daya manusia.

Teori agensi merupakan hubungan antara *principal* yang memberikan wewenang kepada agen. Agen mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan kepada *principal*. Hubungan antar *principal* dengan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetry information*) karena agen memiliki banyak informasi mengenai posisi keuangan dan posisi entitas yang sebenarnya dibandingkan *principal*.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu cara *bonding cost* untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayan publik. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik akan membantu dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dengan proses penyusunan laporan keuangan yang lebih cepat, akurat, dan juga tepat sehingga dapat mengurangi kesalahan yang terjadi.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Nurillah dan Muid (2014), Yuliani dan Agustini (2016), serta Rahmawati, dkk (2018) dalam penelitiannya membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi atau dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi (Bastian, 2011).

Hubungan keagenan dapat terjadi ketika agen menerima wewenang dari *principal* untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga agen bertanggungjawab kepada *principal* atas tugas tersebut. Hubungan tersebut dapat menimbulkan masalah ketidakseimbangan informasi (*asymmetry information*) karena agen memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan dan posisi operasi entitas yang sebenarnya dibandingkan *principal*.

Sistem Pengendalian Intern merupakan salah satu upaya dalam meminimalisir asimetri informasi dengan cara *monitoring cost*. Sistem Pengendalian Intern dirancang memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pengendalian intern akan mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi, dan mencegah inkonsistensi. Dengan demikian, dengan melakukan

pengendalian intern yang baik maka akan dapat membantu menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiranayanti dan Erawati (2016), Karsana dan Suaryana (2017) serta Triyani (2018) membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H3. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Menurut Abdul (2010) kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Hubungan antara agen yang menerima wewenang dari *principal* untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kepentingan *principal* merupakan hubungan keagenan, sehingga agen harus bertanggungjawab kepada *principal*. Hubungan tersebut dapat mengarah pada kondisi asimetri informasi karena agen memiliki banyak informasi tentang posisi

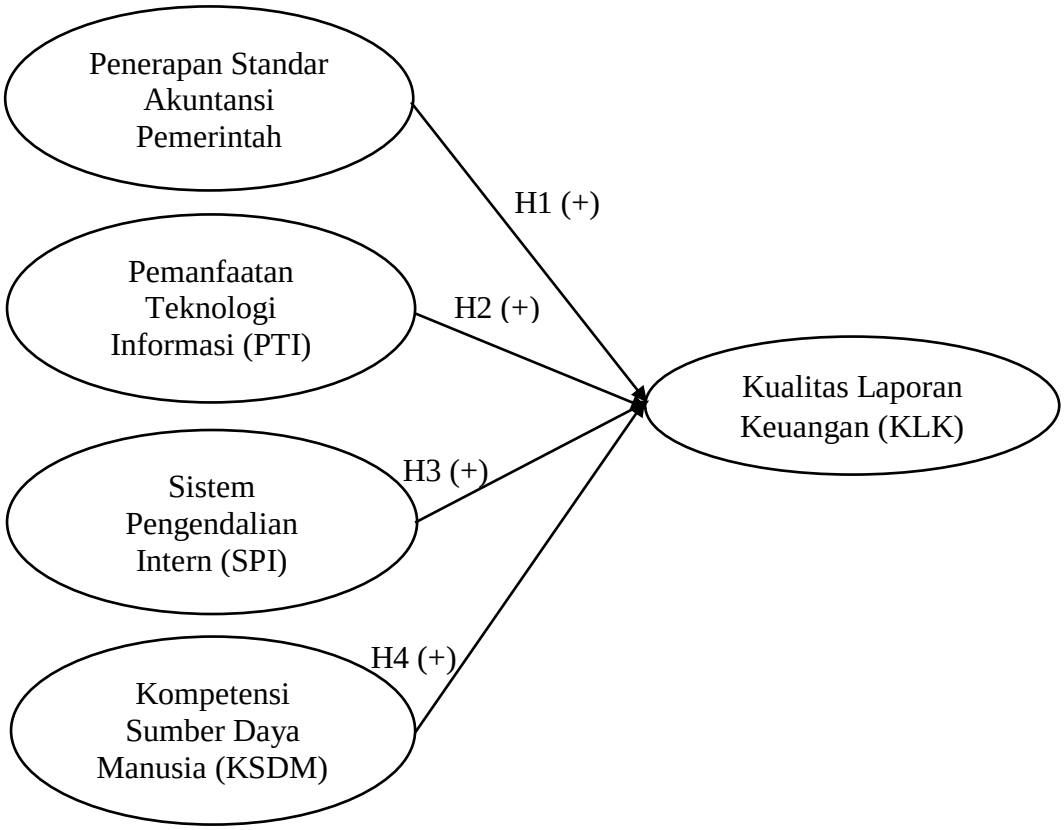
keuangan dan posisi operasi entitas yang sebenarnya dibandingkan *principal*.

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir asimetri informasi dengan cara *bonding cost*. Sumber Daya Manusia merupakan hal yang paling penting dan yang berkaitan langsung dengan sistem sehingga dituntut untuk memiliki keahlian akuntansi yang cukup memadai, atau memiliki kemauan untuk terus belajar dan menambah keahlian di bidang keuangan atau akuntansi. Adanya kompetensi sumber daya manusia yang bagus maka akan dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang bagus pula.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Nurillah dan Muid (2014), Pujanira dan Taman (2017), serta Mahardini dan Miranti (2018) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan pemerintah daerah.

H4. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

D. Model Penelitian



Gambar 2. 1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota dan Kabupaten Magelang.

Pengambilan sampel atau responden dilakukan dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala sub bagian keuangan, bendahara, sekretariat, pejabat penatausahaan keuangan dan staf akuntansi/keuangan/pembukuan dengan alasan bahwa pihak-pihak tersebut yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan OPD dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan dengan asumsi bahwa dalam periode tersebut sudah memiliki pengalaman.

3. Tingkat pendidikan minimal SMA/sederajat untuk pihak-pihak yang terlibat langsung dengan pengelolaan laporan keuangan, dengan asumsi bahwa tingkat pendidikan SMA/sederajat dianggap sudah mempunyai kemampuan yang memadai dan tidak gagap teknologi.

B. Teknik Pengambilan Sampel

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah Kota dan Kabupaten Magelang. Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, jumlah OPD yang ada di website Pemerintah Kota dan Kabupaten Magelang, dan data IHPS Semester I BPK RI Tahun 2017.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dilakukan dengan teknik survei dengan memberikan kuesioner yang langsung diberikan kepada kriteria responden OPD Kota dan Kabupaten Magelang dengan

menggunakan item-item pernyataan dan dibatasi dengan pemberian jawaban dengan bobot 1 sampai 5 untuk tingkat setuju atau tidak setuju.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3. 1
Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
Variabel Dependen			
1. Kualitas Laporan Keuangan (KLK)	Menurut Halim (2007), laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu.	Instrumen 9 butir pernyataan mengacu pada penelitian Rahmawati, dkk (2018) dengan 4 indikator: 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	Interval
Variabel Independen			
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)	SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sehingga SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Rahmawati, dkk 2018).	Instrumen 10 butir pernyataan mengacu pada penelitian Rahmawati, dkk (2018) dengan 3 indikator: 1. Pengakuan 2. Pencatatan 3. Pengukuran	Interval
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)	Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer, perangkat lunak, database, jaringan, *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al, 2000).	Instrumen 5 butir pernyataan mengacu pada penelitian Rahmawati, dkk (2018) dengan 5 indikator: 1. Kesesuaian dengan SAP 2. Jaringan internet termanfaatkan dengan baik	Interval

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran Variabel
(Lanjutan)

	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
			3. Laporan keuangan terkomputerisasi 4. Software sesuai dengan Undang-Undang 5. Aplikasi yang digunakan	
4.	Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi atau dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi (Bastian, 2011).	Instrumen 9 butir pernyataan mengacu pada penelitian Rahmawati, dkk (2018) dengan 5 indikator: 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan	Interval
5.	Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM)	Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Abdul, 2010).	Instrumen 8 butir pernyataan mengacu penelitian Mahardini dan Miranti (2018) dengan menggunakan 4 indikator: 1. Pendidikan 2. Tanggungjawab 3. Pengalaman 4. Pelatihan	Interval

Sumber: data diolah 2019

D. Alat Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu metode-metode pengumpulan, penyajian, dan pengaturan data yang berguna untuk membuat gambaran yang jelas variasi sifat data yang dapat mempermudah proses analisis dan interpretasi. Menurut Ghozali (2018), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, *minimum*, *maksimum*, sum, *range*, *kurtosis* dan *swekness* (kemencengan distribusi).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Uji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). *Confirmatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai *undimensionalitas* atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasikan sebuah variabel. Dengan analisis faktor konfirmatori dapat menguji apakah indikator benar-benar merupakan indikator dari variabel tersebut.

Analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan masing-masing dari indikator ke dalam beberapa faktor apabila indikator yang digunakan merupakan indikator konstruk, kemudian akan mengelompok menjadi satu dengan faktor loading yang tinggi. Ketika pada pengelompokan terdapat kesulitan dalam menginterpretasikan, maka perlu dilakukan rotasi. Alat penting untuk interpretasi faktor adalah *factor rotation*. Rotasi ortogonal melakukan rotasi 90 derajat, sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut *oblique rotation*. Rotasi ortogonal dapat berbentuk *Quartimax*, *Varimax*, *Equimax*, dan *Promax* (Ghozali, 2018).

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Barlett of Spheriicity* merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan *Barlett test* semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat *interkorelasi* antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequancy* (KMO MSA). Nilai KMO MSA bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus > 0,50 untuk dapat dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2018).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan menggunakan alat ukur yang sama. Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian dilakukan dengan menghitung *Cronbach Alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2018).

3. Analisis Regresi Linier Berganda

$KLK = \beta 1PSAP + \beta 2PTI + \beta 3SPI + \beta 4KSDM + e$

Keterangan:

KLK	= kualitas laporan keuangan
$\beta 1, \beta 2, ...\beta 4$	= koefesien regresi berganda
KSDM	= kompetensi sumber daya manusia
PSAP	= penerapan standar akuntansi pemerintahan
PTI	= pemanfaatan teknologi informasi
SPI	= sistem pengendalian intern
e	= eror / residual

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted* R^2)

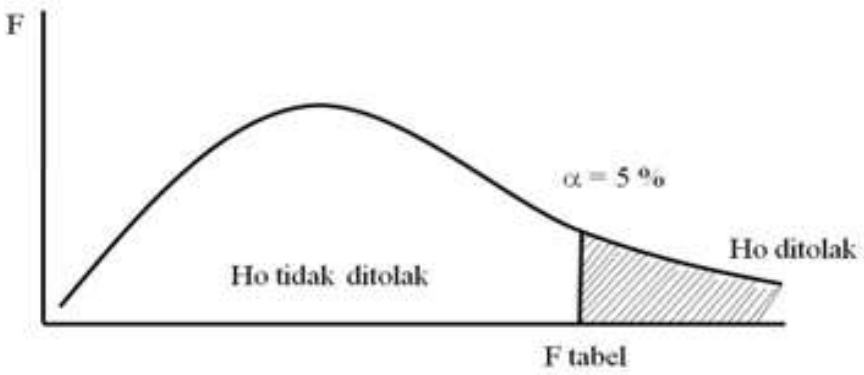
Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2018). Uji R^2 menunjukkan potensi pengaruh semua variabel independen yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI), dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan (KLK). Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu, semakin mendekati 0 maka koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (Ghozali, 2018).

b. Uji F (*Goodness of fit test*)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir suatu nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fit* atau tidak (Ghozali, 2018). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikan 5% dengan derajat kebebasan pemilang df = k dan derajat kebebasan

penyebut (df) = n-k-1 dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau P *value* < α = 0,05, maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).
2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau P *value* > α = 0,05, maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (tidak *fit*).

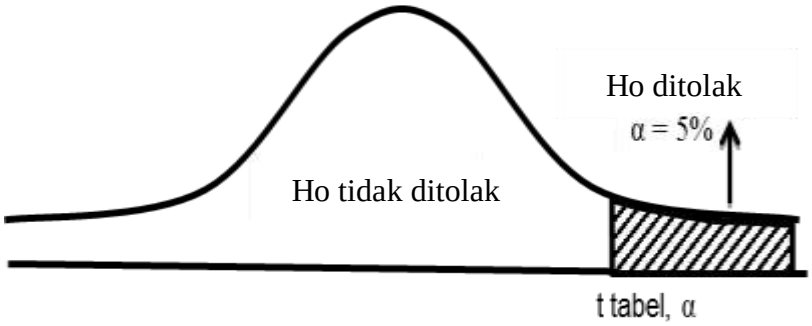


Gambar 3. 1
Penerimaan Uji F

c. Uji Statistik t (t-test)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} masing-masing koefisien regresi dengan t_{tabel} (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan df = n-1 (Ghozali, 2018).

1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau P *value* < α = 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau P *value* > α = 0,05, maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3. 2
Penerimaan Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota dan Kabupaten Magelang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 116 pegawai yang melaksanakan tata usaha akuntansi pada OPD yang terdiri dari Kasubag Keuangan, bendahara, sekretariat, pejabat penatausahaan keuangan dan staf keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut: (1) Uji *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam menjelaskan Kualitas Laporan Keuangan sudah baik, (2) Uji F menunjukkan bahwa model penelitian yang digunakan sudah layak, (3) Uji t menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sementara itu, Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel Dinas dan Badan di OPD Kota dan Kabupaten Magelang, sehingga penelitian ini tidak dapat digeneralisasi di seluruh OPD Kota dan Kabupaten Magelang.
2. Penelitian ini hanya meneliti penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia. Sedangkan masih ada variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya seluruh OPD di Kota dan Kabupaten Magelang.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel yang diduga dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, misalnya seperti komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, sistem informasi akuntansi, dan pengawasan internal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, K. (2010). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pada Pt. Avia Avian. *Tesis.* Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur.

Badan Pemeriksa Keuangan 2017. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017. *Melalui Http://Semarang.Bpk.Go.Id* Diunduh Tanggal 18 Oktober 2018

Bastian, I. (2011). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Darwanis. (2009). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, *2*.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.

Hevei, G. A. (2005). *Standards For Internal Control In New York State Goverment*. Retrieved From Www.Osc.State.Ny.Us

http://Www.Bpk.Go.Id Diakses 18 Oktober 2018

http://Www.Magelangkota.Com Diakses 29 Maret 2019

http://Www.Semarang.Bpk.Go.Id Diakses 28 Maret 2019

Jensen, Mc & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm, Managerial Behaviour, Agency Costs & Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, *3*, 305–360.

Jogiyanto, H. M. (2007). *Metodologi Penelitian: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta.

Karsana, I. W., & Suaryana, I. G. N. A. (2017). Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *21*.

Kiranayanti, I. A. E., & E. N. M. A. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia ,

Sistem Pengendalian Intern , Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, *16*, 1290–1318.

Mahardini, N. Y., & M. A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, *5*(1), 22. https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.500

Nurillah, A. S., & Muid, D. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAKD, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E- Joural Akuntansi UNDIP*, *3*, 1–13.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal*, *VI*.

Purba, M. H. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Kebijakan Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Tesis.* Universitas Sumatera Utara.

Rahmawati, D. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, *20*.

Riandani, R. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Tesis.* Universitas Negeri Padang.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan* (Edisi Keti). BPFE Yogyakarta.

Triyani, Z. (2018). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Tesis.* Universitas Lampung.

Triyanti. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Tesis.* Universitas Negeri Yogyakarta.

Wilkinson, J. W. et al. (2000). *Accounting Information System Essential Concept and Application* (4 Edition). New York-USA: John Willey & Sons Inc.

Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, *14*.